

**KARAKTERISTIK ORGANISASI INTERNASIONAL DAN CONTOH
ADMINISTRASINYA**

**(Disusun untuk memenuhi Ujian Tengah Semester mata kuliah Organisasi
Internasional dan Globalisasi)**



Dosen Pengampu : INTAN FITRI, S.A.N., M.A., Ph.D.

Disusun Oleh Kelompok 3

Ni Kadek Prastika AS	2116041001
Yustina	2116041008
Bima Satria Pratama	2116041028
Aristi Asridewanti	2116041081
Deajeng Putri Azhara	2116041105
Pachri Syaal Bazami	2156041033

**ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	2
BAB II PEMBAHASAN	3
2.1 Karakteristik Organisasi Internasional	3
2.2 Administrasi Organisasi Internasional	12
BAB III PENUTUP	18
3.1 Kesimpulan	18
3.2 Saran	18
DAFTAR PUSTAKA	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam kehidupan yang semakin maju ini, suatu negara tidak dapat hidup tanpa adanya hubungan dengan negara lain. Peran sosial suatu negara terhadap negara lain sangat signifikan, sehingga keberadaan organisasi untuk mengakomodasi hubungan tersebut sangatlah penting. Dalam hubungan antar negara yang kompleks sehingga diperlukan pengaturan agar mencapai tujuan bersama, negara-negara membutuhkan suatu wadah yaitu Organisasi Internasional. Organisasi Internasional merupakan salah satu subyek hukum internasional setelah negara yang merupakan suatu wadah yang menghimpun negara-negara di dunia dalam melakukan suatu kerjasama internasional. Oleh karena itu, pembentukan organisasi-organisasi internasional dipandang sebagai hal yang sangat penting bagi seluruh negara di dunia dalam upaya mencapai tujuan yang menjadi kepentingan bersama yang meliputi berbagai aspek kehidupan internasional yang sangat luas.

Hukum memegang peranan penting dalam menjamin perdamaian dan keamanan dunia dalam setiap interaksi, baik untuk mengatur, merumuskan standar, maupun menegakkan hubungan internasional. Ini memberikan fondasi bagi keberadaan hukum internasional yang berfungsi sebagai landasan pengaturan hubungan antarnegara. Organisasi internasional dibentuk melalui berbagai instrumen utama seperti perjanjian, piagam, undang-undang, atau dokumen lainnya yang menetapkan prinsip-prinsip dasar, tujuan, peran dan tanggung jawab, struktur konstitusional, hak dan kewajiban anggota, serta isu-isu penting lainnya. Dengan instrumen-instrumen tersebut, organisasi internasional dapat beroperasi sesuai dengan prosedur dan mekanisme pengelolaan yang telah diatur dalam kerangka hukum internasional.

Organisasi internasional merupakan hasil dari landasan hukum internasional dan berperan sebagai wadah kerjasama yang menyatukan berbagai negara di dunia dalam lingkup internasional. Sebagai hasil dari adanya organisasi internasional, kerjasama lintas negara akan terbentuk, memungkinkan lembaga-lembaga ini untuk berperan dalam berbagai kapasitas untuk kepentingan global dan kemajuan global. Dalam era globalisasi yang semakin mengintegrasikan negara-negara di seluruh dunia, organisasi internasional memiliki peranan yang penting dan menjadi pusat perhatian dalam upaya mengatur, memfasilitasi, serta mengatasi tantangan global yang semakin kompleks. Fenomena ini tidak terlepas dari adanya dinamika politik, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan yang melintasi batas-batas nasional.

Organisasi-organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan lainnya sangat berperan penting dalam menyediakan platform bagi negara-negara untuk berkolaborasi, mempromosikan perdamaian dan keamanan, serta mengatasi masalah-masalah global seperti perubahan iklim, perdagangan internasional, kesehatan masyarakat, dan kemiskinan. Dalam hal ini, setiap organisasi internasional tentu memiliki karakteristik dan juga administrasinya yang berbeda-beda. Pemahaman yang mendalam tentang karakteristik dasar organisasi internasional sangat penting, karena dapat memengaruhi kinerja dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Namun, meskipun organisasi ini memainkan peran penting dalam menyatukan negara-negara untuk mengatasi tantangan global, mereka juga sering dikritik karena kurangnya representasi dan

keterbatasan dalam penegakan hukum internasional, menunjukkan tantangan yang kompleks dalam mencapai tujuan mereka.

Dengan demikian, pemahaman yang mendalam terkait tentang karakteristik organisasi internasional dan contoh administrasinya tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang cara kerja lembaga-lembaga tersebut, tetapi juga memberikan pandangan yang lebih luas tentang peran, tantangan, dan potensi mereka dalam mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat global. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membuat makalah dengan judul “KARAKTERISTIK ORGANISASI INTERNASIONAL DAN CONTOH ADMINISTRASINYA”

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana karakteristik suatu organisasi internasional?
- b. Apa saja contoh administrasi organisasi internasional?

1.3 Tujuan

- a. Untuk mengetahui karakteristik suatu organisasi internasional.
- b. Untuk mengetahui contoh adminstrasi organisasi internasional.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Karaktersitik Organisasi Internasional

1) PBB

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang sering dikenal sebagai PBB, adalah organisasi terbesar di dunia, dengan hampir setiap negara menjadi anggotanya. PBB didirikan untuk menggantikan LBB (Liga Bangsa-Bangsa) yang dianggap gagal menjaga perdamaian global pasca pecahnya Perang Dunia II (1939-1945). Setelah LBB dibubarkan pada tanggal 18 April 1945, PBB resmi menjalankan tugasnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945, berdasarkan kesepakatan yang dicapai antara 51 negara di San Francisco. Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai misi penting: menjamin perdamaian dan keamanan global sekaligus menjaga hak asasi manusia.

Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan dengan tujuan untuk memajukan perdamaian dan keamanan internasional, membina kerja sama antar negara di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan, dan berfungsi sebagai titik fokus untuk mengoordinasikan tindakan internasional menuju tujuan bersama. PBB memiliki beberapa ciri sebagai berikut.

- a. PBB memiliki 193 negara anggota, yang mencakup hampir semua negara di dunia. Setiap negara anggota memiliki satu suara di Majelis Umum PBB.
- b. PBB merupakan organisasi internasional permanen, yang mana didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
- c. Didirikan oleh negara-negara di dunia atau anggotanya adalah pemerintah yang sah dari negara-negara di dunia. Organisasi jenis ini memiliki tiga ciri, yakni didirikan berdasarkan perjanjian internasional, mempunyai alat perlengkapan/organ, dan hukum yang berlaku adalah hukum internasional.
- d. PBB merupakan contoh dari organizations of universal character, yang mana keanggotannya terdiri dari berbagai negara tanpa membedakan sistem pemerintahannya maupun sistem perekonomiannya.
- e. PBB merupakan bagian dari supranational organizations, yang mana punya kewenangan untuk membuat keputusan atau mengeluarkan peraturan yang langsung mengikat bagi negara anggota, bahkan ada yg langsung mengikat individu dari negara anggota atau perusahaan negara anggota.
- f. PBB termasuk ke dalam organisasi internasional yang memiliki fungsi serbaguna (comprehensive), yang mana organisasi yg tujuannya meliputi semua masalah yang dihadapi oleh para negara anggota.
- g. Kegiatan dan Fokus organisasi PBB melakukan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuannya, termasuk penyelesaian damai konflik, pengiriman bantuan kemanusiaan, memerangi penyakit, mempromosikan pembangunan berkelanjutan, memperjuangkan hak asasi manusia, dan melindungi lingkungan.
- h. PBB didasarkan pada prinsip-prinsip dasar seperti kesetaraan negara, kedaulatan nasional, penyelesaian damai sengketa, larangan penggunaan kekerasan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- i. Salah satu fungsi penting PBB adalah melalui operasi perdamaian, di mana pasukan dari negara-negara anggota dikerahkan untuk menjaga perdamaian dan keamanan di daerah konflik.

- j. PBB dibiayai melalui kontribusi sukarela dari negara-negara anggota, berdasarkan pada kemampuan ekonomi relatif masing-masing negara.

2) ASEAN

ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations (Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara), adalah organisasi regional yang terdiri dari sepuluh negara Asia Tenggara. Anggota ASEAN termasuk Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Tujuan utama ASEAN adalah untuk mendorong kerja sama politik, ekonomi, sosial, dan budaya antar negara anggotanya sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas kawasan. Kelompok ini dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967, melalui Pernyataan Bangkok, dan sejak itu berkembang menjadi salah satu kekuatan diplomatik regional paling kuat di Asia Tenggara. ASEAN didasarkan pada cita-cita non-intervensi dalam urusan dalam negeri anggota, konsensus, dan penyelesaian perselisihan melalui percakapan dan diplomasi. Organisasi ini telah memainkan peran penting dalam mengatasi banyak permasalahan di dunia ASEAN memiliki Karakteristik Utama yaitu sebagai berikut.

- a. Berfokus pada perdamaian dan stabilitas regional, pertumbuhan ekonomi, dan pertukaran budaya.
- b. Beroperasi berdasarkan prinsip saling menghormati, tidak campur tangan, pengambilan keputusan secara konsensus, dan penyelesaian perselisihan secara damai.
- c. Memiliki tiga pilar utama: Komunitas Politik-Kelompok ASEAN (APSC), Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC), dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASCC).

Secara keseluruhan, ASEAN dibedakan berdasarkan strategi membangun konsensus, non-intervensi, dan penekanan pada kerja sama regional untuk mendorong perdamaian, stabilitas, dan pembangunan di Asia Tenggara. Secara kelembagaan, ASEAN mempunyai tipe pasar, artinya ekonomi pasar terkoordinasi, dimana dinamika pasar dikoordinasikan berdasarkan kebijakan negara dan industri. ASEAN memiliki kerangka kelembagaan antar pemerintah dan lebih berorientasi pada jenis pasar terkoordinasi di mana negara-negara saling membantu dan menerapkan kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan dengan mengembangkan konvensi untuk menghormati kehormatan satu sama lain dan tidak melakukan intervensi dalam masalah dalam negeri. Organisasi ASEAN tidak memiliki kemiripan dengan struktur supranasionalis Uni Eropa, dimana sekretaris jenderal dan perwakilan dari masing-masing negara mewakili kepentingan regional ASEAN. Kondisi ini juga memungkinkan negara-negara ASEAN menjalin hubungan bisnis dengan negara-negara ASEAN dan non-ASEAN lainnya. Posisi ini dapat memiliki dua arti, karena negara-negara di kawasan ASEAN saling mendukung atau bersaing satu sama lain sebagai hasil dari perjanjian ekonomi terpisah yang ditandatangani oleh masing-masing negara.

ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) memiliki model institusi yang berbeda dibandingkan dengan organisasi regional lainnya, lebih mengutamakan antarpemerintahan daripada supranasionalisme, seperti Uni Eropa. Model kelembagaan ASEAN mempunyai ciri khas sebagai berikut:

- a. Prinsip Konsensus: Keputusan di ASEAN dibuat melalui musyawarah mufakat. Ini berarti semua negara anggota harus setuju dengan keputusan tersebut.

- b. Tidak ada Kekuasaan Supranasional: ASEAN tidak memiliki lembaga di atas negara anggotanya. Setiap negara anggota mempertahankan kedaulatannya dan tidak ada badan yang bisa memaksakan kepatuhan.
- c. Struktur Multi-Level: ASEAN memiliki struktur berjenjang yang terdiri dari berbagai badan seperti KTT ASEAN (Konferensi Tingkat Tinggi), Dewan Menteri ASEAN, dan Komite-Komite Tetap ASEAN. Masing-masing badan memiliki fungsi dan fokus tertentu.
- d. Sekretariat ASEAN: Berfungsi sebagai badan administratif utama, berbasis di Jakarta, Indonesia. Sekretariat ini memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antar negara anggota, namun tidak memiliki kekuatan pengambilan keputusan.
- e. Fokus pada Kerjasama Antar Pemerintah: ASEAN beroperasi melalui kerjasama antar pemerintah, di mana negara anggota bekerja sama dalam bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama.

3) UNI EROPA

Uni Eropa (UE) adalah organisasi antar pemerintah dan supranasional yang terdiri dari negara-negara Eropa. Organisasi ini merupakan kesatuan ekonomi, ilmiah, dan politik yang terdiri dari 27 negara anggota. Uni Eropa beroperasi menggunakan kombinasi sistem supranasional dan antar pemerintah. Model Kelembagaan Uni Eropa tidak serta merta diterjemahkan ke dalam model kelembagaan tertentu. Namun, Uni Eropa beroperasi pada bentuk kelembagaan berbeda yang bercirikan supranasionalisme dan antarpemerintahanisme.

- a. Supranasionalisme
 - Institusi-institusi UE mempunyai tingkat otoritas tertentu yang melampaui masing-masing negara anggota.
 - Hal ini terlihat jelas di bidang-bidang seperti Menetapkan dan menegakkan peraturan umum (misalnya perdagangan, lingkungan hidup) dan Mengelola mata uang bersama (Zona Euro)
- b. Antarpemerintahan
 - Uni Eropa juga menggunakan sistem antarpemerintahan, yang berarti lembaga-lembaga organ yang bersifat supranasional menjalankan tanggung jawabnya tanpa perlu persetujuan anggota-anggotanya
 - Negara-negara anggota masih memegang kekuasaan yang signifikan di dalam UE.
 - Keputusan mengenai isu-isu besar sering kali memerlukan konsensus atau pemungutan suara mayoritas yang memenuhi syarat di antara negara-negara anggota.
 - Uni Eropa dengan sengaja membentuk mekanisme seperti Dewan Eropa, Parlemen Eropa, dan Pengadilan Eropa untuk memastikan saling melengkapi dan koordinasi sistem yang memungkinkan integrasi supranasional berdasarkan pasar liberal dan persaingan terbuka. Dari perspektif ini, Uni Eropa percaya bahwa pasar terbuka adalah sistem ekonomi yang lebih efisien.

Uni Eropa adalah contoh paling jelas dari integrasi ekonomi yang menghasilkan peningkatan kerja sama ekonomi dan politik di kawasan yang dilanda perselisihan nasional. Liberalisme, seperti dua sisi mata uang yang sama, mempunyai dampak negatif terhadap kelangsungan hidup UE. Ketika pasar menjadi terlalu terbuka dan tidak diatur, hal ini dapat menyebabkan ketidakterkendali, seperti yang terjadi saat ini. Banyak negara UE yang terkena dampak besar, terutama negara-negara yang telah mengadopsi Euro sebagai mata uang mereka dan memiliki kebijakan bebas visa. Hal ini menunjukkan bahwa

kebebasan menghasilkan pertumbuhan dan kemunduran. Dapat dikatakan bahwa masa depan UE saat ini ditentukan oleh kebijakan para elitnya.

4) APEC

Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) merupakan forum ekonomi regional yang beranggotakan 21 negara anggota ekonomi, antara lain Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Tiongkok, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Peru, Filipina, Rusia dan Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, Vietnam, Indonesia, Hong Kong, Jepang dan Korea. APEC didirikan pada bulan November 1989 dan merupakan forum kerja sama ekonomi dengan tujuan mendorong perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka serta memperkuat kerja sama untuk mengembangkan kapasitas ekonomi para anggotanya.

Tujuan utama APEC adalah mendorong pertukaran ekonomi, pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan di kawasan Asia-Pasifik. Hal ini dicapai dengan mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka, serta memperkuat kerja sama untuk mengembangkan kapasitas ekonomi anggota. APEC juga membangun kepercayaan dan hubungan yang saling menguntungkan dengan negara-negara mitra strategis, memastikan pasar Asia-Pasifik tetap terbuka terhadap produk ekspor Indonesia yang berkualitas tinggi dan meningkatkan investasi swasta. Berikut ciri-ciri organisasi Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) :

- a. APEC sebagai forum ekonomi regional yang didirikan pada November 1989 di Canberra, Australia, dengan tujuan memfasilitasi kerja sama dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik.
- b. Memperkuat integrasi ekonomi antar negara anggota di kawasan Asia-Pasifik, memelihara dialog dan kerja sama di berbagai bidang sektor ekonomi.
- c. Jumlah anggota yang besar: APEC mencakup 21 negara anggota, termasuk berbagai negara di kawasan Asia-Pasifik seperti Australia, Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat, serta beberapa negara berkembang seperti Indonesia, Vietnam, dan Peru.
- d. Mengembangkan Kapasitas Ekonomi, APEC tidak hanya bertujuan untuk memperkuat kerja sama ekonomi tetapi juga mengembangkan kapasitas ekonomi masing-masing anggota melalui inisiatif dan program lain bersama-sama.
- e. Inisiatif Kartu Perjalanan Bisnis APEC (ABTC): Salah satu inisiatif utama APEC adalah Kartu Perjalanan Bisnis APEC (ABTC), yang memfasilitasi Kondisi perjalanan yang menguntungkan bagi pengusaha di kawasan Asia-Pasifik meningkatkan perdagangan dan investasi.
- f. APEC Memakai struktur yang berbasis konsensus. Keputusan di APEC diambil berdasarkan konsensus, dengan masing-masing negara anggota memainkan peran yang sama dalam menentukan arah utama dan agenda.
- g. APEC dikenal sebagai organisasi internasional non-politik, artinya tujuannya hanya sebatas kerja sama ekonomi dan perdagangan, bukan untuk ikut campur dalam masalah politik antar negara anggota.
- h. Simbol warna Logo APEC memiliki dua warna biru dan hijau yang melambangkan aspirasi masyarakat kawasan Asia-Pasifik terhadap kehidupan yang sejahtera dan berkelanjutan, sedangkan warna Putih melambangkan stabilitas dan perdamaian di kawasan.
- i. APEC fokus pada ekonomi dan perdagangan dengan menyelenggarakan pertemuan tingkat tinggi dan forum dialog untuk membahas isu-isu terkait pertumbuhan ekonomi dan perdagangan di kawasan.

- j. APEC memiliki struktur terbuka yang memungkinkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

Peran APEC bagi Indonesia dan Kawasan:

- a. Manfaat APEC bagi Indonesia: Jalan membangun kepercayaan dan hubungan saling menguntungkan dengan negara-negara mitra strategis/perekonomian Indonesia di kawasan.
- b. Langkah-langkah untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Indonesia melalui pelatihan teknis dan proyek peningkatan kapasitas serta berbagi praktik terbaik.
- c. Langkah-langkah untuk memastikan pasar Asia-Pasifik tetap terbuka bagi produk ekspor Indonesia yang berkualitas tinggi.

Manfaat APEC bagi kawasan:

- a. Membantu menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di kawasan melalui - - pertukaran informasi kebijakan.
- b. Fasilitasi peningkatan perdagangan regional: - Sarana diskusi di dalam dan lintas batas mengenai isu-isu perdagangan dan investasi serta isu-isu yang sering menimbulkan ancaman ekonomi seperti tanggap bencana, dll.
- c. Mendorong model pertumbuhan berkualitas melalui lima strategi pertumbuhan: seimbang, inklusif, berkelanjutan, inovatif dan aman.
- d. Memfasilitasi dunia usaha khususnya melalui program APEC Business Travel Card (ABTC).

5) Konferensi Asia-Afrika

KAA atau Konferensi Asia-Afrika merupakan pertemuan tingkat tinggi yang diselenggarakan oleh negara-negara di Asia dan Afrika. Anggota Konferensi Asia Afrika (KAA) adalah negara-negara Asia dan Afrika. Pada tahun 1955, KAA diadakan di Bandung, Indonesia dan diikuti oleh 29 negara. Negara-negara peserta KAA 1955 antara lain India, Burma, Pakistan, Sri Lanka, dan berbagai negara di Afrika seperti Ghana, Sudan, dan Libya. Saat itu, KAA merupakan gagasan yang diajukan pada Konferensi Kolombo yang dihadiri oleh negara-negara pendukung perjuangan masyarakat kolonial melawan kolonialisme di Afrika.

Tujuan utama KAA adalah memperkuat solidaritas dan kerja sama antar negara di Asia dan Afrika, serta mendorong perdamaian dan kerja sama internasional. KAA juga bertujuan untuk mengkaji permasalahan hubungan sosial, ekonomi dan budaya antara negara-negara Asia dan Afrika. Selain itu, tujuan didirikannya KAA adalah untuk mempertimbangkan posisi negara-negara Asia dan Afrika, serta berkontribusi dalam memperkuat perdamaian dan kerja sama internasional. KAA mewakili momen penting dalam sejarah negara-negara Asia dan Afrika dan merupakan langkah penting dalam memperkuat solidaritas.

Konferensi Asia Afrika (KAA) telah memberikan dampak yang besar terhadap politik global, baik di Asia maupun Afrika. Konferensi ini berhasil membangun hubungan yang lebih baik antara negara-negara Asia dan Afrika, serta berkontribusi dalam membangkitkan semangat perjuangan anti-kolonial di Afrika. Selain itu, KAA juga memberikan dampak positif terhadap perjuangan kemerdekaan negara-negara di Afrika, membantu memantau dan membangun hubungan antar negara-negara tersebut. Karakteristik organisasi Konferensi Asia Afrika (KAA) meliputi berbagai aspek, antara lain:

- a. Tujuan : Acara KAA bertujuan untuk meningkatkan hubungan dan koordinasi antara negara-negara Asia dan Afrika serta membangun semangat perjuangan anti kolonial di Afrika.

- b. Pengaruh : KAA mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam perpolitikan dunia, baik di Asia maupun Afrika. Konferensi ini berhasil membangun hubungan yang lebih baik antar negara dan berkontribusi dalam membangkitkan semangat perjuangan anti-kolonial di Afrika.
- c. Pemanfaatan media digital: Museum Konferensi Asia Afrika memanfaatkan media digital seperti Instagram, Facebook, Twitter, YouTube dan virtual tour untuk menyebarkan berita informasi khususnya di masa pandemi Covid-19.
- d. Keterlibatan kerja: Organisasi KAA memiliki tingkat keterikatan kerja yang tinggi sehingga mempengaruhi kinerja karyawan.
- e. Konservasi bangunan: KAA memiliki bangunan bergaya Art Deco, seperti Hotel Preanger dan Hotel Savoy Homann di Kota Bandung, yang sedang dikaji untuk konservasi dan restorasi.
- f. Transformasi digital: Museum Konferensi Asia Afrika mengutamakan pengembangan media digital untuk menyebarkan informasi kepada pengunjung.

KAA juga memiliki dampak yang membantu mengubah citra Indonesia sebagai negara yang memiliki posisi yang terhormat dalam diplomasi pascakolonial, khususnya di Asia dan Afrika atau "Dunia Ketiga". Selain itu, konferensi ini juga memiliki dampak yang membantu mengubah citra Indonesia sebagai negara yang aktif dan berpengaruh di dunia politik. Konferensi ini juga memiliki dampak yang luas terhadap kota Bandung, yang merupakan kota penyelenggaraan konferensi. KAA berhasil membangun kota Bandung sebagai "Kota Konferensi Internasional", yang memiliki dampak positif bagi sektor pariwisata kota Bandung, serta meningkatkan investasi dan kerjasama asing. Selain itu, KAA juga memiliki dampak yang membantu mengubah citra Bandung sebagai kota politik global, yang diikuti oleh pembangunan dan terbentuknya citra Bandung sebagai ruang terkoneksi aktor politik global.

KAA juga memberikan dampak dalam membantu mengubah citra Indonesia sebagai negara yang memiliki posisi terhormat dalam diplomasi pascakolonial, khususnya di Asia dan Afrika atau "Dunia Ketiga". Selain itu, konferensi ini juga berdampak membantu mengubah citra Indonesia sebagai negara yang dinamis dan berpengaruh di dunia politik. Konferensi ini juga memberikan dampak yang luas bagi kota Bandung, kota tuan rumah konferensi tersebut. KAA berhasil menetapkan Kota Bandung sebagai "kota konvensi internasional" yang memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata Kota Bandung serta peningkatan investasi dan kerja sama asing. Selain itu, KAA juga berdampak dalam membantu perubahan image Bandung sebagai kota politik global, sehingga berujung pada berkembang dan terbentuknya image Bandung sebagai ruang penghubung para aktor politik global.

6) NATO

NATO, atau Organisasi Perjanjian Atlantik Utara, didirikan pada tanggal 4 April 1949, adalah aliansi politik-militer yang bertujuan untuk mengoordinasikan keamanan dan pertahanan di antara negara-negara anggota. Dengan 30 anggota saat ini, termasuk Amerika Serikat, Kanada dan beberapa negara Eropa, NATO memiliki struktur organisasi di mana Dewan Atlantik Utara merupakan badan pengambil keputusan tertinggi. Prinsip pertahanan kolektif yang tertuang dalam Pasal 5 Perjanjian Washington adalah salah satu pilar utama NATO, yang menyatakan bahwa serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh aliansi. NATO telah berpartisipasi dalam berbagai operasi militer di seluruh dunia, termasuk operasi penjaga perdamaian di Balkan, Afghanistan dan Libya. Selain itu, NATO juga menjalin kemitraan dengan negara-negara non-anggota dan organisasi internasional

lainnya untuk memperkuat kerja sama keamanan dan pertahanan. Organisasi ini mempunyai tiga fungsi utama:

- a. Membangun dan mengelola hubungan internasional yang efektif dan berkelanjutan.
- b. Membangun dan mengelola sistem yang mampu menangani konflik dan krisis internasional.
- c. Menciptakan dan mengelola sistem yang dapat membantu negara-negara anggota mengatasi masalah keamanan internasional.

Seiring berjalannya waktu, NATO terus beradaptasi terhadap perubahan lingkungan keamanan global, menghadapi berbagai tantangan seperti ancaman dari negara-negara yang dianggap musuh tradisional, terorisme internasional, dan terorisme internasional, ekonomi dan perubahan iklim. Organisasi ini didirikan untuk menjamin keamanan internasional dan kekerasan di Eropa dan negara-negara tetangga lainnya. Tujuan utama pembentukan NATO adalah untuk mengatur dan menjamin keamanan transnasional di Eropa dan sekitarnya melalui perjanjian yang disebut Perjanjian Brussels. NATO adalah organisasi yang terdiri dari 30 pemerintah nasional yang bersatu untuk melindungi keamanan internasional. Negara-negara tersebut berlokasi di Eropa, Amerika Utara dan Eropa Timur. Berikut adalah Karakteristik yang dimiliki oleh NATO:

- a. NATO menerapkan sistem demokrasi dalam semua proses pengambilan keputusan. Artinya setiap negara anggota mempunyai hak suara dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam mengelola organisasinya, NATO menerapkan sistem demokrasi dalam semua proses pengambilan keputusan.
- b. NATO memiliki kebebasan Bahkan sebagai anggota NATO, negara-negara masih menghormati kebebasan berperilaku. NATO berkomitmen untuk menghormati semua kebebasan negara anggota. Hal ini mencakup kebebasan menentukan kebijakan dalam dan luar negeri, serta kebebasan menyampaikan pendapat dan pandangan.
- c. Solidaritas yang kuat, Anggota NATO yang beranggotakan orang bertekad untuk menjaga persatuan dalam berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Jika suatu anggota menghadapi ancaman terhadap keamanannya, maka anggota lainnya harus mendukung dan bersatu untuk menjamin keamanan bersama.
- d. NATO mempunyai pertahanan Bersama. Setiap serangan terhadap satu anggota NATO dianggap sebagai serangan terhadap seluruh negara anggota NATO. Artinya jika salah satu negara anggota diserang, maka anggota lainnya wajib menunjukkan solidaritas dan ikut serta dalam pertahanan bersama.
- e. Manajemen krisis dan keamanan kooperatif, Fungsi NATO adalah pertahanan kolektif, manajemen krisis dan keamanan kooperatif. NATO menggunakan kombinasi yang tepat antara alat politik dan militer untuk mengelola krisis dalam lingkungan keamanan yang semakin kompleks. Selain itu, NATO juga berperan dalam menciptakan stabilitas dan meningkatkan keamanan di luar wilayah anggotanya.

7) Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) merupakan satu-satunya organisasi antar pemerintah yang mewakili umat Islam dunia ("Kemenpppa", 2016). Organisasi Kerjasama Islam dibentuk berdasarkan adanya berbagai isu-isu yang menyebar di berbagai belahan dunia terutama di bagian timur dengan berbagai isu keagamaan (Mughofar et al., 2016). Hal tersebut membawa pengaruh kepada negara-negara

dengan mayoritas pemeluk Islam dengan menggabungkan dirinya bersama dengan negara-negara Islam lainnya dan membentuk organisasi keislaman. OKI memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Pembentukan OKI antara lain ditujukan untuk meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota, mengoordinasikan kerja sama antar-negara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, serta melindungi tempat-tempat suci Islam dan membantu perjuangan rakyat Palestina. OKI beranggotakan 57 negara Islam atau berpenduduk mayoritas muslim di kawasan Asia dan Afrika.
- b. Sebagai organisasi internasional yang pada awalnya lebih banyak menekankan pada masalah politik, terutama masalah Palestina, dalam perkembangannya OKI menjelma sebagai suatu organisasi internasional yang menjadi wadah kerja sama di berbagai bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan antar negara-negara muslim.
- c. Untuk menjawab berbagai tantangan yang mengemuka, negara-negara anggota OKI memandang pentingnya terlaksananya Reformasi OKI berikut penataan kembali prioritas organisasi di masa mendatang.
- d. Sejalan dengan keinginan tersebut, OKI mengesahkan OIC-2025 Programme of Action pada 2016. Dokumen tersebut program prioritas OKI, beserta Prinsip dan Tujuan-tujuan utama. Sejumlah isu yang masuk menjadi prioritas antara lain Palestina, kontra-terorisme dan Islamofobia, perdamaian dan keamanan, pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, serta sains, teknologi, dan inovasi.
- e. Dalam mencapai prioritas-prioritasnya, OKI akan mendasarkan diri pada sejumlah Prinsip seperti solidaritas Islam, kemitraan, dan kerja sama; good governance; serta koordinasi yang efektif dan sinergi.
- f. Badan pengambil keputusan tertinggi OKI adalah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Islam (Islamic Summit) yang diselenggarakan dua tahun sekali. KTT Islam terakhir kalinya diselenggarakan di Makkah, pada 31 Mei 2019. KTT tersebut antara lain mengesahkan Resolusi Palestina dan Al Quds Al Sharif, yang intinya menegaskan kembali komitmen dunia Islam dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina.

8) The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

UNESCO merupakan organisasi Internasional yang bergerak pada bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. UNESCO didirikan pada 16 November 1945 dengan tujuan untuk membangun perdamaian melalui Kerjasama internasional di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya. Adapun program UNESCO dibagi menjadi 5 sektor utama yaitu Pendidikan, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Sosial, Budaya, dan Komunikasi dan Informasi. Koordinasi terkait isu-isu pada forum UNESCO dikoordinasikan oleh Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU), dibantu oleh Kemlu dan berbagai Kementerian/Lembaga lainnya. Karakteristik UNESCO antara lain:

- a. UNESCO (Organisasi Pendidikan, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan) adalah organisasi internasional yang berfungsi untuk membantu negara-negara menjamin, meningkatkan, dan mempersebar ilmu pengetahuan, serta mengungkapkan konservasi dan pengamanan patrimoni dunia.
- b. UNESCO menciptakan seni dan kultur dengan berbagai bentuk seni, seperti monumental sculpture dan garden design.

- c. Organisasi ini mengelola dan mengelola berbagai bangunan dan tempat yang memiliki nilai universal yang unik dari segi historis, estetik, atau ilmiah.
- d. UNESCO membantu mengatur dan mengelola bagian-bagian dari dunia yang memiliki nilai kultural dan alam, seperti bangunan, park, dan ruang terdesain.
- e. Organisasi ini juga membantu mengelola dan mengatur kawasan alam yang memiliki nilai unik, seperti kawasan alam, laut, dan gunung.
- f. UNESCO membantu mengelola dan mengatur kawasan sejarah, seperti situs arkeologi, bangunan, dan kawasan seni

9) Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO)

Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) adalah badan khusus PBB, yang didirikan pada tahun 1944 untuk mengelola administrasi dan tata kelola Convention on International Civil Aviation (Chicago Convention). Pembentukan ICAO dimulai pasca Perang Dunia Kedua, ketika industri pesawat untuk jaringan penumpang dan angkutan barang semakin berkembang. Perkembangan itu diikuti dengan banyak kendala, baik politis maupun teknis, antara lain dalam standarisasi fasilitas penerbangan dan pengembangan rute penerbangan. Karakteristik ICAO antara lain:

- a. Mandat ICAO sampai saat ini adalah untuk membantu Negara-negara mencapai tingkat keseragaman setinggi mungkin dalam peraturan, standar, prosedur, dan organisasi penerbangan sipil.
- b. ICAO bekerja sama dengan 193 Negara Anggota dan kelompok industri untuk mencapai konsensus tentang Standards and Recommended Practices (SARPs).
- c. Kebijakan dalam mendukung sektor penerbangan sipil yang aman, efisien, aman, berkelanjutan secara ekonomi dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

10) International Labour Organization (ILO)

Organisasi Ketenagakerjaan Internasional/International Labour Organization (ILO) dibentuk berdasarkan Traktat Versailles pada tahun 1919 bersamaan dengan berdirinya Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Dalam perkembangannya, pada tahun 1945 ILO menjadi Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sampai dengan tahun 2021, anggota ILO berjumlah 187 negara. ILO merupakan organisasi internasional satu-satunya di bawah PBB yang beranggotakan tiga unsur yaitu unsur Pemerintah, unsur Pengusaha, unsur Pekerja. Seluruh kebijakan dan program ILO dirumuskan dan ditetapkan oleh ketiga unsur tersebut. Karakteristik ILO antara lain:

- a. ILO dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan keadilan sosial bagi masyarakat di seluruh dunia, khususnya bagi kaum pekerja. Dalam Mukadimah Konstitusi ILO dinyatakan bahwa perdamaian abadi hanya mungkin tercipta atas dasar keadilan sosial. Syarat-syarat kerja masih mencerminkan ketidakadilan dan selama hal tersebut masih terjadi, maka berbagai guncangan yang terjadi akan mengancam keserasian dan ketentraman hidup. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan syarat-syarat kerja dan norma kerja, serta upaya untuk mengatasi masalah pengangguran.
- b. ILO mempunyai tugas utama yaitu merumuskan kebijaksanaan dan program internasional untuk memperbaiki lapangan pekerjaan dan kehidupan para pekerja; serta menyusun standar ketenagakerjaan internasional untuk dijadikan pedoman bagi Negara anggota dalam membuat dan melaksanakan kebijakan ketenagakerjaan khususnya dalam membuat peraturan perundangan ketenagakerjaan.
- c. Dalam proses penyusunan standar ketenagakerjaan internasional dimaksud, ILO selalu melibatkan unsur Tripartit sejak pada tahapan penetapan topik sampai

dengan adopsi di International LabourConference (ILC) atau Konferensi Perburuhan Internasional.

2.2 Administrasi Organisasi Internasional

1) PBB

PBB memiliki enam organ utama yaitu sebagai berikut.

a. Majelis Umum

Majelis Umum adalah majelis permusyawaratan utama PBB, yang terdiri dari semua negara anggota PBB. Majelis ini bertemu setahun sekali di bawah kepemimpinan seorang ketua yang dipilih oleh negara-negara anggota, dengan satu suara untuk setiap anggota.

b. Dewan Keamanan

Dewan Keamanan terdiri dari 15 negara anggota, lima di antaranya merupakan anggota tetap dengan hak veto (hak absolut), yaitu Tiongkok, Perancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat, serta sepuluh anggota tidak tetap, yang merupakan diganti setiap dua tahun dan saat ini berada di Bosnia dan Herzegovina, Brasil, Kolombia, Gabon, Jepang, Jerman, India, Lebanon, Nigeria, Portugal, dan Afrika Selatan. Dewan Keamanan PBB bertanggung jawab menjaga perdamaian dan keamanan internasional di antara negara-negara anggotanya.

c. Sekretariat

Sekretariat PBB dikelola oleh seorang Sekretaris Jenderal PBB yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tim pegawai negeri sipil internasional dari seluruh dunia. Sekretaris Jenderal bertanggung jawab atas berbagai kegiatan, termasuk menyediakan penelitian, informasi, dan ruang pertemuan kepada badan-badan PBB. Selain itu, Sekretaris Jenderal bertugas membantu penyelesaian perselisihan internasional, mengatur operasi pemeliharaan perdamaian, menyelenggarakan konferensi internasional, mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan keputusan Dewan Keamanan, dan berkonsultasi dengan pemerintah anggota mengenai berbagai inisiatif. Sekretaris Jenderal mempunyai masa jabatan lima tahun untuk menjalankan tugasnya.

d. Dewan Sosial dan Ekonomi

Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) bekerja bersama Majelis Umum untuk mempromosikan kerjasama dan pembangunan ekonomi dan sosial internasional. ECOSOC mempunyai 54 anggota, semuanya dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan tiga tahun. Presiden ECOSOC dipilih untuk satu tahun. Tugas kelembagaan ECOSOC meliputi pengumpulan informasi, memberikan nasihat kepada negara-negara anggota, dan mengeluarkan rekomendasi.

e. Dewan Perwalian

Dewan Perwalian PBB adalah sistem perwalian internasional yang telah diperluas oleh anggota PBB untuk mengelola pemerintah daerah di bawah pengawasan PBB melalui perjanjian perwalian individu. Dewan beranggotakan lima orang ini memastikan bahwa wilayah-wilayah yang tidak mempunyai pemerintahan sendiri dikelola dengan mempertimbangkan penduduk lokal, sehingga mencapai keamanan dan perdamaian dunia.

f. Mahkamah Internasional

Mahkamah Internasional, atau ICJ, mengadili dan menyelesaikan perselisihan antara negara-negara anggota PBB sambil juga memberikan pendapat penasehat kepada badan-badan resmi dan organisasi-organisasi khusus PBB untuk membantu mereka mengatasi permasalahan. Majelis Umum dan Dewan Keamanan memilih

15 hakim di Mahkamah Internasional untuk masa jabatan sembilan tahun. Hakim dibantu oleh Register, organ administratifnya. Selain itu, hakim ad hoc dapat dibentuk untuk menangani banyak perkara yang dinilai perlu untuk diajukan.

Sekretariat PBB mengawasi berbagai prosedur manajemen, koordinasi, dan pelaporan. Sekretariat disusun menjadi departemen, divisi, dan unit khusus yang menangani berbagai tugas administratif, operasional, dan teknis. Pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, logistik, komunikasi, dan kolaborasi dengan pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan mitra lainnya semuanya merupakan bagian dari administrasi PBB. Misinya adalah untuk memastikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan PBB di seluruh dunia.

2) ASEAN

Dilansir dari Setnas-asean.id, Berikut adalah struktur organisasi ASEAN.

a. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN merupakan pertemuan tingkat tinggi para pemimpin negara atau pemerintahan negara-negara anggota ASEAN. KTT ini berfungsi sebagai otoritas dan representasi kekuatan tertinggi ASEAN. Tujuan dari KTT ini, yang akan mencakup diskusi dengan berbagai pemimpin negara, adalah untuk mengidentifikasi tujuan ASEAN di masa depan.

b. Dewan Koordinasi ASEAN

Dewan Koordinasi merupakan pertemuan para menteri luar negeri negara anggota ASEAN untuk mengkoordinasikan Dewan Komunitas ASEAN.

c. Dewan Masyarakat ASEAN

Dewan masyarakat ASEAN merupakan pertemuan para menteri yang membidangi tiga pilar Komunitas ASEAN: politik-keamanan, ekonomi, dan sosial budaya.

d. Pertemuan Badan Sektorial Tingkat Menteri

Pertemuan Badan Sektorial Tingkat Menteri ini mempertemukan para menteri yang membidangi masing-masing bidang kerja sama ASEAN.

e. Pertemuan tingkat pejabat tinggi ASEAN

Pertemuan resmi tingkat tinggi ASEAN mempertemukan para pejabat tinggi dari negara-negara anggota ASEAN yang bertanggung jawab pada setiap sektor kerja sama ASEAN namun tidak memegang posisi menteri.

f. Sekretariat ASEAN

Sekretariat ASEAN yakni organ ASEAN yang berfungsi meningkatkan koordinasi antarbadan dan komite di ASEAN; koordinasi ASEAN dengan pihak eksternal, termasuk organisasi internasional; serta implementasi berbagai kegiatan dan proyek dalam kerangka kerja sama ASEAN secara lebih efektif. Sekretariat ASEAN dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, yang diangkat oleh Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN untuk periode lima tahun. Sekretaris Jenderal dipilih dari warga negara anggota ASEAN berdasarkan rotasi menurut urutan abjad nama negara dalam bahasa Inggris. Tugas Sekretaris Jenderal meliputi:

- Membantu pelaksanaan berbagai kesepakatan/keputusan ASEAN;
- Memantau dan melaporkan perkembangan capaian ASEAN kepada KTT ASEAN; dan
- Menyampaikan pandangan dan sikap ASEAN kepada eksternal sesuai pedoman kebijakan dan mandatnya.

g. Komite wakil tetap ASEAN

Komite Wakil Tetap ASEAN adalah forum para Duta Besar/Wakil Tetap terakreditasi negara-negara anggota ASEAN yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

h. Sekretariat Nasional

Sekretariat Nasional yakni pimpinan kegiatan (focal point) tingkat nasional setiap negara ASEAN yang memiliki tugas menyimpan informasi mengenai urusan ASEAN, mengoordinasikan pelaksanaan keputusan ASEAN, serta memajukan identitas dan kesadaran ASEAN.

i. Komite antarpemerintah untuk HAM ASEAN

Komite ini yakni Badan HAM ASEAN yang bertugas memajukan dan melindungi HAM seluruh masyarakat di ASEAN.

3) UNI EROPA

Uni Eropa memiliki tiga lembaga utama, yaitu sebagai berikut.

- a. Parlemen Eropa, yang mewakili dan dipilih langsung oleh warga negara UE. Fungsi utama Parlemen Eropa adalah menyetujui undang-undang Eropa. Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa berbagi peran ini, sementara Komisi Eropa mengusulkan rancangan undang-undang. Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa berbagi tanggung jawab untuk menyetujui anggaran tahunan Uni Eropa. Parlemen Eropa juga membentuk Ombudsman Eropa, yang menganalisis keluhan masyarakat mengenai buruknya administrasi lembaga-lembaga Uni Eropa.
- b. Dewan Uni Eropa, mewakili setiap negara anggota. Dewan Eropa, bersama dengan Parlemen Eropa, bertanggung jawab untuk mengesahkan undang-undang dan mengambil keputusan kebijakan. Dewan Uni Eropa juga bertanggung jawab atas urusan luar negeri Uni Eropa dan upaya kebijakan keamanan bersama, yang dipandu oleh pedoman strategis yang ditetapkan oleh Dewan Eropa.
- c. Komisi Eropa, mewakili kepentingan keseluruhan Uni Eropa. Komisi Eropa membuat undang-undang Eropa yang baru dan menyerahkannya ke Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa. Komisi Eropa mengawasi pelaksanaan harian kebijakan UE dan pengeluaran dana UE. Bersama dengan Mahkamah Eropa, Komisi Eropa memastikan bahwa semua undang-undang Eropa diterapkan dengan baik di setiap Negara Anggota Uni Eropa.

‘Segitiga kelembagaan’ inilah yang menghasilkan kebijakan dan undang-undang yang berlaku di seluruh Uni Eropa.

Dua lembaga lain memiliki peran penting pula yaitu sebagai berikut

- a. Badan Pemeriksa Keuangan Eropa yang mengawasi penggunaan anggaran Uni Eropa;
- b. Mahkamah Uni Eropa yang membantu memastikan bahwa Negara-Negara Anggota mematuhi undang-undang Uni Eropa yang telah mereka sepakati.

Selain itu, Uni Eropa memiliki sejumlah lembaga dan badan antar-lembaga yang melaksanakan peran-peran khusus.

4) APEC

APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) adalah organisasi internasional yang fokus pada bidang ekonomi dan perdagangan di Asia-Pasifik. Dalam organisasi ini, administrasi memegang peranan penting dalam menyusun, mengatur dan mengelola kegiatan organisasi. Di bawah ini informasi terkait struktur organisasi, fungsi, dan peran administratif dalam kebijakan APEC:

- a. Struktur organisasi: Organisasi APEC mempunyai struktur yang kompleks, meliputi banyak unit, unit bawahan, beroperasi berdasarkan prinsip koordinasi

yang erat dengan mencapai tujuan organisasi. Struktur ini memungkinkan APEC untuk mengelola berbagai aspek perekonomian dan perdagangan di kawasan Asia-Pasifik.

- b. Fungsi administratif: Fungsi administratif dalam organisasi APEC mencakup berbagai aktivitas seperti pengembangan kebijakan, pengelolaan aktivitas organisasi, dan penanganan masalah administratif. Badan pengatur APEC bekerja sama dengan unit lain seperti Unit Ekonomi, Unit Bisnis, dan Unit Pembangunan untuk mencapai tujuan organisasi.
- c. Peran kebijakan: Badan manajemen APEC memainkan peran penting dalam mengelola aktivitas organisasi dan mengembangkan kebijakan. Pemerintah bekerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan kebijakan yang efektif dan efisien yang dapat berdampak pada perekonomian dan perdagangan di kawasan Asia-Pasifik.

5) KAA

Dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) dapat dilihat pada struktur organisasi yang terkait dengan peraturan, kewajiban, dan pengelolaan konferensi. Berikut adalah contoh administrasi dalam KAA:

- a. Ketua Konferensi: Para kepala negara atau perwakilan tertinggi negara-negara peserta Konferensi Asia-Afrika memainkan peran penting dalam menentukan arah dan tujuan konferensi.
- b. Panitia Persiapan: Sebelum rapat dimulai, biasanya terdapat panitia persiapan yang bertugas mempersiapkan agenda, lokasi, keamanan, dan hal-hal praktis lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan rapat.
- c. Sekretariat: Biasanya terdapat sekretariat atau tim manajemen yang bertanggung jawab atas logistik, administrasi, dan koordinasi selama persiapan dan pelaksanaan pertemuan.
- d. Komite: Beberapa komite dapat dibentuk selama pertemuan untuk membahas topik tertentu seperti masalah politik, ekonomi, sosial, atau budaya.

Komite-komite ini dapat terdiri dari perwakilan dari berbagai negara peserta. Pengambilan keputusan: Setiap negara peserta memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan, dan keputusan dibuat melalui konsensus atau pemungutan suara sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

6) NATO

NATO mencakup beberapa bidang, termasuk keuangan, personel, logistik dan operasi. Berikut adalah contoh tata kelola dalam NATO:

- a. Keuangan: NATO memiliki sistem keuangan yang kompleks dan terintegrasi. Organisasi ini memastikan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan dana. Pengelolaan keuangan di NATO meliputi pengelolaan anggaran, pengelolaan dana, pengelolaan pajak, dan pengelolaan keuangan internasional.
- b. Personil: NATO memiliki sistem manajemen personalia yang memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Organisasi memiliki sistem manajemen sumber daya manusia yang terintegrasi, sehingga memungkinkan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien.
- c. Logistik: NATO memiliki sistem logistik yang kompleks dan terintegrasi. Organisasi ini memiliki sistem logistik yang efisien dan efektif, termasuk manajemen logistik, manajemen pasokan, manajemen peralatan dan manajemen transportasi.

- d. Operasi: NATO memiliki sistem operasional yang kompleks dan terintegrasi. Organisasi memiliki sistem operasi yang efisien dan efektif, termasuk manajemen operasi, manajemen keamanan, manajemen pengawasan dan manajemen pengendalian. Manajemen dalam NATO sangat penting untuk menjamin efektivitas dan efisiensi organisasi.

Setiap wilayah administratif NATO bekerja sama untuk mencapai tujuan utama organisasi yaitu menciptakan situasi keamanan dan perdamaian di kawasan Atlantik Utara. Adapun struktur organisasi dalam NATO (North Atlantic Treaty Organization) yang terdiri dari dua bagian utama: organisasi sipil (sektor sipil) dan organisasi militer (sektor militer).

a. Organisasi sipil (sektor sipil):

- Dewan Atlantik Utara (Dewan): Dewan ini mengatur dan mengendalikan keputusan dan kebijakan NATO.
- Divisi Sipil: Terdiri dari komisi yang mengatur aspek politik, keamanan dan kewirausahaan di kawasan NATO.

b. Struktur militer (cabang militer): – Menteri Pertahanan semua negara anggota: Organisasi dan pengendalian kegiatan militer di wilayah NATO.

- Operasi Komando Sekutu (ACO) dan Transformasi Komando Sekutu (ACT): Dua struktur komando strategis yang membantu mengatur operasi militer NATO.
- Kantor pusat ACO berlokasi di Belgia, Italia, dan Belanda.
- ACT bermarkas di Norfolk, Virginia, namun pusat analisis dan pembelajaran berlokasi di Portugal, Polandia, dan Norwegia.

NATO juga menjalin kerja sama dalam masalah keamanan bersama dengan sembilan negara lain, termasuk negara-negara di kawasan Asia-Pasifik seperti Australia, Jepang, Korea Selatan, Mongolia, dan Selandia Baru.

7) Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Konferensi Tingkat Tinggi Islam: KTT Islam terdiri dari Raja, Kepala Negara, dan Kepala Pemerintahan Negara Anggota yang merupakan otoritas tertinggi Organisasi. KTT Islam akan mempertimbangkan, mengambil keputusan kebijakan, dan memberikan panduan tentang semua masalah yang berkaitan dengan realisasi tujuan sebagaimana diatur dalam Piagam dan mempertimbangkan masalah lain yang menjadi perhatian bagi Negara-negara Anggota dan umat. Konferensi Islam akan bersidang setiap tiga tahun di salah satu Negara Anggota.

- a. Dewan Menteri Luar Negeri: Konferensi Tingkat menteri atau Dewan Menteri Luar Negeri merupakan pertemuan Menteri Luar Negeri dari seluruh Negara Anggota. Dewan Menteri Luar Negeri akan diselenggarakan setahun sekali di salah satu Negara Anggota. Dewan Menteri Luar Negeri dapat merekomendasikan pertemuan menteri sektoral lainnya untuk menangani masalah-masalah khusus yang menjadi perhatian umat.
- b. Sekretariat Jenderal: Sekretariat Jenderal terdiri dari Sekretaris Jenderal, yang menjadi Kepala Pejabat Administrasi Organisasi dan staf seperti yang diminta Organisasi. Sekretaris Jenderal dipilih oleh Dewan Menteri Luar Negeri untuk jangka waktu lima tahun, dapat diperbarui sekali saja. Sekretaris Jenderal harus dipilih dari antara warga negara dari Negara Anggota sesuai dengan prinsip-prinsip distribusi geografis yang adil, rotasi, dan kesempatan yang sama untuk semua Negara Anggota dengan mempertimbangkan kompetensi, integritas dan pengalaman.

8) The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

- a. General Conference: organ tertinggi/badan pengambil keputusan utama UNESCO, berlangsung dua tahun sekali. GC terakhir (ke-41) pada 2021.
- b. Executive Board: terdiri dari 58 negara anggota yang dipilih oleh General Conference, untuk masa kerja selama empat tahun. Anggota EB bertemu dua kali setahun, dan memiliki fungsi untuk mengkaji perkiraan anggaran dan program kerja UNESCO sebelum diadopsi oleh General Conference, serta mengawasi pelaksanaan program-program UNESCO.
- c. Sekretariat: Sekretariat UNESCO, dikepalai oleh Direktur Jenderal, merupakan organ yang menjalankan berbagai program UNESCO. DG UNESCO dinominasikan oleh EB dan dipilih oleh GC UNESCO.
- d. Jakarta Field Office: Kesepakatan antara Pemerintah dan UNESCO untuk pendirian kantor UNESCO di Jakarta ditandatangani pada 1967. Sejak 2001, Kantor UNESCO Jakarta menjadi Science Bureau for Asia and the Pacific and Cluster Office Indonesia, Malaysia, dan Filipina, dan sejak tahun 2002, menjadi focal point untuk Timor Leste.

9) Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO)

Struktur organisasi ICAO terdiri dari Assembly (Majelis), Council (Dewan), dan Secretariat (Sekretariat).

- a. ICAO diketuai oleh Presiden serta Sekretaris Jenderal. Majelis merupakan perwakilan dari semua negara anggota yang melakukan pertemuan setiap tiga tahun sekali. Dalam pertemuan Majelis, dievaluasi kinerja ICAO, menetapkan kebijakan ke depan dan perencanaan anggaran.
- b. Sementara Dewan, beranggotakan negara-negara yang dipilih secara langsung oleh majelis untuk masa jabatan 3 tahun. Negara-negara yang terpilih menjadi anggota dewan merupakan negara-negara yang sangat penting dalam transportasi udara, negara yang dapat menyediakan fasilitas navigasi udara, serta negara yang dapat menggambarkan perwakilan seluruh negara di dunia.
- c. Sekretariat ICAO dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.

10) Organisasi Perburuhan Internasional (ILO)

- a. International Labour Organization diketuai oleh direktur jenderal
- b. Memiliki struktur kepengurusan dari sekretaris jenderal, asisten dan tenaga spesialis pada bidang-bidang.
- c. Terdapat keanggotaan di dalam ILO yaitu anggota regular Governing Body
- d. Selain anggota regular, ILO memiliki anggota deputi dan anggota biasa di dalamnya.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Organisasi internasional memiliki peran yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan global, yang meliputi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Dengan menyediakan wadah bagi negara-negara untuk berkolaborasi, organisasi-organisasi ini memungkinkan upaya bersama dalam menghadapi tantangan-tantangan global yang kompleks. Kerjasama internasional yang difasilitasi oleh lembaga-lembaga ini menjadi sangat krusial dalam menanggapi isu-isu seperti perubahan iklim, terorisme, dan pandemi yang tidak mengenal batas negara. Masing-masing organisasi internasional memiliki ciri khasnya sendiri, tujuan yang ditetapkan, dan fungsi yang unik. Perbedaan-perbedaan ini membantu dalam pemahaman terhadap peran serta kontribusi yang mereka berikan dalam memecahkan permasalahan di berbagai bidang di seluruh dunia. Struktur organisasi dan tata kelola yang berbeda-beda ini dirancang dengan tujuan untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing organisasi. Administrasi memegang peran sentral dalam menjaga kelancaran operasi organisasi internasional. Dengan mengelola proses-proses internal dan eksternal, administrasi memastikan bahwa organisasi dapat berfungsi secara efisien dan efektif. Berbagai struktur dan fungsi organisasi internasional bervariasi tergantung pada tujuan mereka, keanggotaan yang terlibat, dan bidang operasional yang mereka hadapi. Pemahaman yang mendalam terhadap struktur dan fungsi organisasi internasional menjadi kunci dalam memahami dinamika hubungan internasional dan upaya-upaya kolaboratif yang dilakukan secara global.

3.2 Saran

Dari penjelasan diatas saran yang dapat kami berikan ialah; negara-negara anggota dari setiap organisasi perlu memperkuat komitmen mereka terhadap kerjasama internasional dalam mengatasi tantangan global. Hal ini meliputi peningkatan partisipasi aktif dalam forum-forum organisasi internasional dan lebih banyaknya alokasi sumber daya untuk mendukung inisiatif kolaboratif, organisasi internasional juga perlu meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Dengan demikian, akan tercipta kepercayaan yang lebih besar dari publik dan negara-negara anggota serta meningkatkan akuntabilitas dalam pencapaian tujuan organisasi. Keterlibatan masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta dalam kegiatan organisasi internasional juga dapat menghasilkan solusi yang lebih beragam dan berkelanjutan terhadap masalah global. Ini dapat dilakukan melalui konsultasi terbuka, dialog lintas-sektor, dan kolaborasi proyek. Serta organisasi internasional perlu terus meningkatkan kapasitas administratif mereka untuk mengelola operasi yang semakin kompleks dan tantangan yang beragam. Ini termasuk investasi dalam pelatihan, teknologi informasi, dan pengembangan sistem manajemen yang inovatif. Diharapkan organisasi internasional dapat menjadi lebih efektif dalam mengatasi tantangan global dan mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Cornelesz, A. T. P. (2018). Kedudukan Organisasi Internasional Sebagai Wadah Kerjasama Antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional. *Lex Et Societatis*, 6(6).
- Dewi, N. H. P. (2020). Memahami Peran Organisasi Internasional dalam Hal Intervensi Kemanusiaan. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 1(2), 134-143.
- Hartana, & Putri Sita Rohmadani. (2022). PERAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA WANITA . *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 3(2), 239-248.
- <https://fisipol.ugm.ac.id/uni-eropa-asean-membandingkan-model-institusional-dan-mekanisme-pasar/>
- Kusmayadi, Y. (2018). Pengaruh Konferensi Asia Afrika (KAA) Tahun 1955 Terhadap Kemerdekaan Negara-Negara Di Benua Afrika. *Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, 8(01), 15.
- Mardani, H., & Machmudi, Y. (2021). Peran dan Kepentingan North Atlantic Treaty Organization (NATO) Dalam Konflik Perang Sipil di Libya: Studi Kasus Periode Tahun 2011-2015. *Middle East and Islamic Studies*, 8(2).
- Muhammad Ilham, 152030196 (2019) PERAN ICAO (INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION) DALAM PENANGANAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL. Skripsi(S1) thesis, FISIP UNPAS.
- Pakpahan, B. (2014). Bagaimana Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Menyesuaikan Harapan dan Menjawab Tantangan untuk Mencapai Berbagai Tujuannya?. *Jurnal Politik Internasional*, 16(2).
- Pettinger, R. (2002). *Global organizations*. Capstone.
- Pijar. (2024). Organisasi APEC: Tujuan, Sejarah, Anggota, dan Struktur Organisasinya. Diakses pada 2 April 2024 melalui <https://www.pijarbelajar.id/blog/organisasi-apec>
- Priscilla, C., & Yudhyarta, D. Y. (2021). Implementasi Pilar-Pilar Pendidikan UNESCO. *Asatiza: Jurnal Pendidikan*, 2(1), 64–76.
- Puri, C. N. ., & Yumitro, G. (2022). Peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam Penguatan Diplomasi Islam. *Sospol : Jurnal Sosial Politik*, 8(1), 96–108.
- Simanjuntak, T. R., & Wijanarka, T. (2016). Masa Depan Uni Eropa Setelah Krisis Yunani. *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial*, 5(1).
- Sugiono, M. (2017). Brexit, Integrasi Eropa, dan Regionalisme ASEAN. *Jurnal Lemhannas RI*, 5(1), 57-65.
- Sujadmiko, B., Rudi Natamiharja, R. N., & Meutia, I. F. (2023). *Global Organization*. Suluh Media.